

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN CIPARI KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA

Rivan Ramdan¹, Agus fatah hidayat², Dian Herlina³
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Program PKH adalah bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin untuk mendorong akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan kunci, yaitu lurah, kasi kesra, pendamping PKH, ketua kelompok, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH cukup efektif berdasarkan lima indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007), yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan terjadinya perubahan nyata. Namun demikian, program masih menghadapi tantangan seperti ketidakakuratan data dan kurangnya pemahaman sebagian penerima manfaat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan validasi data, sosialisasi, serta koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci: Efektivitas, PKH, Keluarga Miskin, Kesejahteraan, Bantuan Sosial

Abstrack

This study aims to analyze the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in improving the welfare of poor families in Cipari Village, Mangkubumi District, Tasikmalaya City. The PKH program is a conditional social assistance program provided to poor families to promote access to education, health care, and welfare. This study used a descriptive qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation from key informants, including the village head, the social welfare head, PKH facilitators, group leaders, and beneficiaries. The results indicate that PKH is quite effective based on five indicators of effectiveness according to Sutrisno (2007): program understanding, targeting accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible change. However, the program still faces challenges such as data inaccuracy and a lack of understanding among some beneficiaries. This study recommends improving data validation, outreach, and cross-sectoral coordination.

Keywords: Effectiveness, PKH, Poor Families, Welfare, Social Assistance

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan kompleks dan multidimensional yang dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, namun tantangan yang dihadapi tidak pernah sederhana. Kemiskinan tidak hanya sekadar persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang menyeluruh dan berkelanjutan agar masyarakat miskin dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi persoalan kemiskinan adalah melalui implementasi program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial dirancang untuk memberikan bantuan kepada kelompok rentan agar dapat bertahan dari guncangan sosial dan ekonomi, sekaligus mendorong mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam konteks ini, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang mulai diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2007. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai yang disertai dengan kewajiban pemenuhan persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut mencakup aspek pendidikan dan kesehatan, seperti kewajiban menyekolahkan anak, melakukan pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil, membawa balita ke posyandu, serta merawat anggota keluarga lansia atau penyandang disabilitas sesuai standar layanan sosial dasar.

PKH dirancang dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia, di mana keluarga penerima manfaat (KPM) diharapkan tidak hanya menerima bantuan secara pasif, tetapi juga didorong untuk aktif mengakses layanan publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Kelompok sasaran utama dari PKH mencakup ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia berusia 70 tahun ke atas. Dengan bantuan yang bersifat periodik dan bersyarat, pemerintah berharap keluarga miskin dapat memiliki insentif untuk berperilaku sesuai dengan tujuan pembangunan sosial jangka panjang.

Secara nasional, PKH telah menunjukkan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Namun, dalam pelaksanaannya di tingkat daerah, efektivitas program ini tidak selalu berjalan dengan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pelaksana, distribusi data yang kurang akurat, hingga lemahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan PKH benar-benar menyentuh sasaran dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Di Kota Tasikmalaya, khususnya di Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, program PKH telah diimplementasikan kepada ratusan keluarga. Berdasarkan data terbaru, tercatat sebanyak 586 rumah tangga miskin di wilayah tersebut menjadi penerima manfaat PKH. Jumlah ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat akan bantuan sosial dan menjadi indikator bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan serius di daerah tersebut. Kondisi ini memerlukan perhatian lebih, terutama dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat.

Meskipun sudah berjalan cukup lama, pelaksanaan PKH di Kelurahan Cipari masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan serius. Salah satu persoalan yang cukup mencolok adalah ketidaktepatan sasaran, di mana ditemukan bahwa beberapa penerima bantuan tidak sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai rumah tangga sangat miskin. Sebaliknya, beberapa keluarga yang seharusnya layak menerima bantuan justru tidak terdata sebagai penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendataan dan verifikasi masih memerlukan perbaikan agar distribusi bantuan menjadi lebih adil dan akurat.

Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tujuan program juga masih tergolong rendah. Banyak penerima manfaat yang belum memahami sepenuhnya mengenai hak dan kewajiban mereka dalam program, termasuk pentingnya kepatuhan terhadap komponen bersyarat yang menjadi inti dari PKH. Rendahnya pemahaman ini dapat menyebabkan program tidak berjalan efektif, karena partisipasi aktif dari keluarga penerima menjadi kurang maksimal. Padahal, keterlibatan aktif KPM sangat dibutuhkan agar program tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi mampu membentuk perubahan perilaku sosial yang positif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana program ini telah memberikan dampak yang diharapkan, diperlukan suatu evaluasi mendalam yang menyentuh berbagai aspek pelaksanaan PKH. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga menilai efektivitas program dari sudut pandang hasil yang dicapai, ketercapaian sasaran, efisiensi penggunaan sumber daya, hingga keberlanjutan manfaat program. Dalam hal ini, pendekatan evaluasi yang komprehensif menjadi penting untuk mengetahui apa yang telah berjalan dengan baik dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program PKH di daerah tersebut dengan menggunakan lima indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007).

Tabel 1
Jumlah Keluarga Miskin

No	Kategori Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga	Persentase (%)
1	Sangat Miskin	210	35.84%
2	Miskin	185	31.57%
3	Rentan Miskin	121	20.65%
4	Pendamping Baru	70	11.95%
	Total	586	100%

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Cibeureum. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan masukan kebijakan dan strategi implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas kesehatan anak di daerah tersebut. Dari hasil observasi peneliti penulis, maka penulis menemukan beberapa fenomena dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam

meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumu Kota Tasikmalaya yaitu :

1. Program Keluarga Harapan masih belum tepat sasaran
2. Belum memahaminya masyarakat dalam mekanisme pencabutan penerima PKH yang sudah tidak layak menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen publik merupakan kajian interdisipliner yang membahas berbagai aspek umum dari suatu organisasi. Bidang ini memadukan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, dengan elemen-elemen penting lainnya seperti sumber daya manusia, keuangan, sarana fisik, sistem informasi, hingga dinamika politik. Dalam praktiknya, keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada bagaimana manajemen dijalankan secara efektif dan efisien.

Manajemen publik memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan pelayanan publik. Dengan pendekatan manajerial yang sistematis, instansi publik dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut bagaimana organisasi merespons kebutuhan publik secara adaptif.

Selain itu, manajemen publik juga berperan penting dalam mendorong inovasi birokrasi dan memperkuat kapabilitas institusi. Dalam menghadapi tantangan global dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, sektor publik dituntut untuk terus bertransformasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip manajemen modern yang didukung oleh kepemimpinan yang visioner dan partisipatif menjadi kunci dalam menciptakan organisasi publik yang tangguh dan responsif terhadap perubahan.

Menurut (Akhmad, 2019) dalam jurnalnya mengatakan bahwa pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi.

Efektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu program atau kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas diartikan sebagai keefektifan, daya guna, atau kemampuan untuk membawa hasil atau pengaruh sesuai dengan yang diharapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam menghasilkan output yang relevan dan sesuai sasaran.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran, yang telah Menurut (Sutrisno, 2007) mengukur efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu :

1) Pemahaman Program

Indikator ini menilai sejauh mana masyarakat atau penerima manfaat memiliki pemahaman yang cukup mengenai isi, tujuan, serta mekanisme pelaksanaan program

yang dijalankan. Program yang baik seharusnya dapat disosialisasikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat sasaran. Tingkat pemahaman ini penting karena menjadi dasar partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Apabila masyarakat tidak memahami program dengan baik, maka potensi keberhasilan program tersebut akan menurun, bahkan bisa menimbulkan salah persepsi atau penolakan terhadap kegiatan yang dilakukan.

2) Tepat Sasaran

Indikator ini mengukur apakah program telah menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan atau yang sesuai dengan kriteria sasaran program. Ketepatan sasaran sangat krusial dalam menjamin keadilan dan efektivitas pelaksanaan program. Jika bantuan atau intervensi program jatuh pada kelompok yang tidak tepat, maka tujuan program akan meleset dan sumber daya yang digunakan menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, validitas data penerima manfaat serta proses verifikasi yang akurat sangat diperlukan dalam menjamin bahwa program benar-benar menyentuh pihak yang seharusnya menerima.

3) Tepat Waktu

Aspek ini berkaitan dengan ketepatan dalam pelaksanaan program sesuai jadwal atau waktu yang telah direncanakan. Program yang dijalankan secara tepat waktu menunjukkan adanya kesiapan dari penyelenggara dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Ketepatan waktu juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Jika program sering mengalami keterlambatan, maka kepercayaan masyarakat akan menurun dan tujuan program bisa terhambat. Oleh karena itu, manajemen waktu menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program secara keseluruhan.

4) Tercapainya Tujuan

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan awal dari program telah tercapai secara konkret. Setiap program pasti memiliki tujuan yang telah dirumuskan sejak awal perencanaan. Keberhasilan program dapat dilihat dari sejauh mana hasil pelaksanaan mampu menjawab permasalahan yang menjadi latar belakang program tersebut. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh di lapangan dengan target yang telah ditetapkan. Jika seluruh atau sebagian besar tujuan dapat tercapai, maka program dapat dinilai sebagai efektif.

5) Perubahan Nyata

Indikator terakhir mengukur sejauh mana program mampu memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, perilaku, maupun kesejahteraan secara keseluruhan. Perubahan yang dimaksud adalah transformasi yang positif dan berkelanjutan, bukan hanya efek sesaat. Program yang efektif seharusnya mampu mendorong perubahan nyata yang bisa meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga dengan melihat perubahan yang terjadi di tengah masyarakat setelah program dilaksanakan.

Sedangkan efektivitas menurut (Budiani, 2007) menyatakan efektivitas program sebagai berikut :

1) Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran dalam pengertian ini merujuk pada kondisi di mana program yang dijalankan berhasil menjangkau individu atau kelompok yang menjadi target utama. Sasaran yang tepat menjadi tolok ukur keberhasilan awal dalam pelaksanaan program.

Bila program disalurkan kepada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria, maka efektivitas program akan menurun, dan dapat menimbulkan ketimpangan sosial atau kecemburuan di masyarakat. Oleh sebab itu, penetapan sasaran harus melalui proses identifikasi kebutuhan yang matang dan berbasis data yang akurat.

2) Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana program kepada masyarakat atau kelompok sasaran. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui, memahami, dan akhirnya mendukung pelaksanaan program. Sosialisasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi secara formal, tetapi juga harus komunikatif, mudah dipahami, dan dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masyarakat mendapatkan informasi yang cukup dan jelas, mereka akan lebih siap dan mampu menjalankan peran serta tanggung jawab dalam program tersebut, sehingga tujuan program lebih mudah tercapai.

3) Tujuan Program

Aspek ini menilai seberapa jauh hasil pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sejak awal. Kejelasan tujuan menjadi dasar dalam menyusun strategi pelaksanaan program serta indikator evaluasi keberhasilan. Jika tujuan yang ingin dicapai dapat diwujudkan secara nyata dan menyentuh kebutuhan masyarakat sasaran, maka efektivitas program pun dinilai tinggi. Dalam hal ini, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala agar dapat melihat pencapaian tujuan secara objektif dan berkelanjutan.

Menurut pandangan (Sutrisno, 2018) mengidentifikasi empat karakteristik utama yang mempengaruhi EFEKTIVITAS organisasi diantaranya sebagai berikut:

1) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi mencakup aspek struktur organisasi, teknologi yang digunakan, serta proses-proses internal yang berlangsung di dalamnya. Struktur organisasi yang tertata dengan baik memungkinkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga meminimalisir tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan koordinasi antar bagian. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi yang sesuai dan terkini dapat menunjang efisiensi kerja, mempercepat alur komunikasi, dan memperbaiki kualitas layanan atau produk yang dihasilkan. Proses internal yang sistematis dan terstandarisasi juga berperan dalam menciptakan alur kerja yang lebih teratur dan terukur, sehingga meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan.

2) Karakteristik Lingkungan

Lingkungan organisasi terdiri dari dua dimensi utama, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi kondisi sumber daya manusia, budaya organisasi, dan sistem kerja yang berlaku di dalam organisasi. Sementara itu, lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial dan politik. Organisasi yang mampu membaca perubahan lingkungan eksternal dan melakukan penyesuaian secara adaptif cenderung lebih mudah dalam mempertahankan keberlanjutan dan mencapai tujuan strategisnya. Kemampuan organisasi dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak luar seperti masyarakat, mitra kerja, maupun lembaga pemerintah, juga merupakan faktor penting dalam menciptakan efektivitas kerja yang berkelanjutan.

3) Karakteristik Pekerja



Sumber daya manusia merupakan aset vital dalam organisasi. Kualitas pekerja yang mencakup keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan etos kerja sangat memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, sikap dan motivasi individu juga memegang peranan penting. Pekerja yang memiliki loyalitas tinggi, rasa memiliki terhadap organisasi, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, biasanya akan memberikan kontribusi lebih maksimal. Semangat kerja yang positif dapat mendorong kolaborasi tim yang kuat, mempercepat pencapaian target, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan karyawan melalui pelatihan, penghargaan, dan komunikasi yang terbuka perlu menjadi perhatian manajemen.

4) Kebijakan dan Praktik Manajemen

Kebijakan manajerial yang diterapkan dalam suatu organisasi sangat menentukan arah dan keberhasilan operasionalnya. Kebijakan yang dirancang secara strategis akan mendorong tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan berbagai sumber daya. Kepemimpinan yang visioner dan mampu menginspirasi bawahannya akan menciptakan iklim kerja yang positif dan produktif. Selain itu, manajemen yang efektif harus mampu membangun komunikasi dua arah yang terbuka dan transparan, sehingga mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen organisasi. Praktik-praktik manajerial juga mencakup kemampuan dalam berinovasi, fleksibilitas terhadap perubahan, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan yang terus berubah. Organisasi yang terus belajar dan berkembang akan lebih mudah menghadapi tantangan dan mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan yang semakin ketat.

Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu suatu program bantuan social besyarat Keluarga Miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH. Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan program PKH yang memiliki tujuan untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program perlindungan social yang juga dikenal sebagai *Conditional Cash Transfer (CCT)* di dunia internasional terbukti efektif dalam memerangi kemiskinan di berbagai negara. Sebagai program bantuan social besyarat bagi masyarakat, PKH memungkinkan keluarga miskin khususnya ibu hamil dan anak, untuk menggunakan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang tersedia di sekitarnya.

Sebagai salah satu strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat yang berfokus pada rumah tangga, Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran keluarga miskin (KM) dalam jangka pendek. Sementara itu, dalam jangka menengah, program ini ditujukan untuk mendorong perubahan perilaku penerima manfaat agar lebih aktif memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan, sehingga tercipta generasi masa depan yang lebih sehat dan berpendidikan.

Tujuan jangka panjang dari PKH adalah memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dengan memberikan dukungan kepada keluarga miskin agar anak-anak mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak serta perawatan kesehatan yang optimal sejak dini, maka peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan di masa depan akan semakin besar. Investasi pada kualitas sumber daya manusia ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, PKH juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial yang mampu meredam risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat rentan. Di tengah ketidakpastian ekonomi, program ini dapat menjadi jaring pengaman yang menjaga

stabilitas sosial dan mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat. Melalui pengelolaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, PKH diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

“Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah”. (Sugiyono, 2018)

Penelitian kualitatif berbasis filsafat postpositivisme atau enterpretif digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data triangulasi yang digunakan, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan cenderung kualitatif, dan analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dimaksud dengan. (Sugiyono, 2018 hal. 9)

Menurut (Sugiyono, 2018, hal 91) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi, tetapi oleh Spadley dinamakan “*Social situation*” atau pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut dengan keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang ngobrol, atau ditempat kerja, dikota, desa atau wilayah suatu negara. Dapat digambarkan sebagai berikut:

Penelitian kualitatif tidak menggunakan konsep populasi, karena kajiannya berfokus pada kasus spesifik dalam suatu situasi sosial tertentu. Hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh populasi, melainkan dapat ditransfer ke konteks atau situasi sosial lain yang memiliki kesamaan karakteristik dengan kasus yang diteliti.

Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling*, yang merupakan teknik pengambilann sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian kualitatif ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* menurut (Sugiyono, 2018) teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber daya dengan pertimbangan tertentu.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Dalam pemilihan informan penelitian biasanya dipilih berdasarkan relevansi mereka terhadap topik dari penelitian tersebut, sehingga para informan penelitian ini dapat memberikan data yang mendalam dan benar. Penelitian ini menggunakan informan sebagai berikut:

1. Lurah Kelurahan Cipari
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
3. Pendamping program Keluarga Harapan (PKH)
4. Ketua Program Keluarga Harapan (PKH)
5. Penerima Program Keluarga Harapan (2 Orang)

Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas ini dilaksanakan penulis telah melaksanakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi menggunakan pisau asah parameter oleh (Sutrisno, 2007) yaitu:

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

Adapun lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemahaman Program

Sebagian besar informan memahami secara umum bahwa PKH adalah bantuan bersyarat, tetapi belum semua penerima memahami hak dan kewajiban, terutama terkait pertemuan P2K2 dan sanksi bila melanggar syarat. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif. Kurangnya pemahaman ini dapat memengaruhi partisipasi aktif keluarga penerima manfaat dalam menjalankan kewajibannya. Pendamping sosial perlu melakukan pendekatan yang lebih persuasif dan komunikatif agar pesan program tersampaikan secara utuh.

2. Tepat Sasaran

Data menunjukkan bahwa sebagian penerima tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin namun masih menerima bantuan. Ini disebabkan belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akibatnya, ada potensi kecemburuan sosial dan ketidakefisienan penggunaan anggaran. Jika hal ini terus dibiarkan, akan mengurangi kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah dan menghambat tercapainya tujuan pengentasan kemiskinan.

3. Tepat Waktu

Bantuan PKH umumnya dicairkan setiap triwulan. Menurut informan, pencairan dana biasanya tepat waktu, namun pernah terjadi keterlambatan akibat kendala teknis di pusat dan ketidaksesuaian data rekening penerima. Keterlambatan ini bisa menimbulkan kebingungan di kalangan penerima manfaat dan mengganggu pengelolaan keuangan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, sistem pencairan dana perlu ditingkatkan dari sisi ketepatan data dan koordinasi antar pihak terkait.

4. Tercapainya Tujuan

Tujuan jangka pendek PKH seperti meringankan beban ekonomi dan meningkatkan akses layanan dasar sebagian besar telah tercapai. Banyak anak penerima manfaat yang tetap sekolah dan ibu hamil yang rutin memeriksakan kandungannya. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi PKH telah memberikan dorongan positif terhadap perilaku keluarga miskin dalam mengakses layanan publik. Namun, efektivitas jangka panjang masih perlu dipantau secara berkala untuk memastikan keberlanjutannya.

5. Perubahan Nyata

PKH memberikan dampak nyata, seperti peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan dan kesehatan, serta berkurangnya beban ekonomi keluarga miskin. Namun, perubahan perilaku belum merata karena masih ada keluarga yang pasif dan hanya menunggu bantuan. Sebagian penerima belum menunjukkan inisiatif untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara mandiri, yang menunjukkan

perlu strategi pemberdayaan yang lebih kuat. Peran pendamping sosial sangat penting dalam membimbing dan memotivasi penerima agar lebih aktif dan mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa program PKH telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini juga telah memberikan dampak positif dalam meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat, meskipun masih ditemukan beberapa kendala di lapangan.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipari dinilai cukup efektif berdasarkan lima indikator efektivitas. Program ini memberikan kontribusi dalam meringankan beban ekonomi dan mendorong perubahan perilaku masyarakat miskin. Namun, beberapa kendala seperti data yang belum diperbarui dan pemahaman masyarakat yang masih rendah menjadi catatan penting untuk pembenahan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Bogor: Azkiya Publishing
- Sutrisno, Edy. (2007) *Budaya Organisasi*, Jakarta: Kencana
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Sosial* Vol. 2 No.1, 49-57.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan Ke-17. Bandung: Alfabeta

Sumber Lain

- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan